



Analisis Kebijakan Moneter Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Alwi Rifa'i¹, Fauzan Najib², Muhammad Iqbal Asy'ari Lubis³, Rifki Maulana⁴,
Tengku Muhammad Rafly Rachman⁵, Sari Wulandari⁶

¹²³⁴⁵Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara

⁶Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email: alwirifai046@gmail.com¹, fauzannajib2003@gmail.com², iballubis03@gmail.com³,
maulanarifki712@gmail.com⁴, raflyrachman02@gmail.com⁵, sariwulandari@umnaw.ac.id⁶

Alamat: Jalan William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: alwirifai046@email.com

Abstract. Sustainable development is a global agenda that includes three main pillars: economic, social and environmental sustainability. Monetary policy, as an important instrument in the economy, has the potential to support sustainable development through controlling inflation, managing interest rates, and regulating liquidity. However, the implementation of these policies often faces challenges, such as unequal distribution of economic benefits, low financial literacy, and resistance to the transition to a green economy. This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data was collected through document analysis, policy reports, statistical data from Bank Indonesia, as well as literature studies from accredited journals. The research results show that monetary policy in Indonesia has contributed to economic stability through controlling inflation and strengthening the exchange rate. Bank Indonesia has also developed green financial instruments, such as green sukuk, to support environmentally friendly projects. However, challenges remain, including dependence on commodity exports, inadequate financial infrastructure, and a lack of coordination between monetary and fiscal policy. Increasing the effectiveness of monetary policy in supporting sustainable development requires synergy with fiscal policy, structural reform and innovation in financial inclusion. Public financial literacy and incentives for the green sector are important strategic steps. With a holistic approach, monetary policy can be the main catalyst for achieving sustainable development goals in Indonesia.

Keywords: Monetary policy, sustainable development, green finance, economic stability, Indonesia

Abstrak. Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang mencakup tiga pilar utama: keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebijakan moneter, sebagai instrumen penting dalam perekonomian, memiliki potensi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian inflasi, pengelolaan suku bunga, dan pengaturan likuiditas. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan, seperti ketidakseimbangan distribusi manfaat ekonomi, rendahnya literasi

Received Desember 30, 2024; Revised Januari 30, 2025; Accepted Februari 27, 2025

* Alwi Rifa'i, alwirifai046@email.com

keuangan, dan resistensi terhadap transisi menuju ekonomi hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, laporan kebijakan, data statistik dari Bank Indonesia, serta studi literatur dari jurnal terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter di Indonesia telah berkontribusi pada stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi dan penguatan nilai tukar. Bank Indonesia juga telah mengembangkan instrumen keuangan hijau, seperti green sukuk, untuk mendukung proyek ramah lingkungan. Namun, tantangan tetap ada, termasuk ketergantungan pada ekspor komoditas, infrastruktur keuangan yang belum memadai, dan kurangnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal. Peningkatan efektivitas kebijakan moneter dalam mendukung pembangunan berkelanjutan memerlukan sinergi dengan kebijakan fiskal, reformasi struktural, dan inovasi dalam inklusi keuangan. Literasi keuangan masyarakat serta insentif untuk sektor hijau menjadi langkah strategis yang penting. Dengan pendekatan holistik, kebijakan moneter dapat menjadi katalis utama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan moneter, pembangunan berkelanjutan, keuangan hijau, stabilitas ekonomi, Indonesia

LATAR BELAKANG

Naskah ditulis menggunakan spasi 1,5 dengan jenis huruf *times new roman* ukuran 12 pt. Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang umum penelitian (secara ringkas dan jelas), *review* terkait topik penelitian yang relevan, uraian tentang kebaruan (*gap analysis*) yang mengandung urgensi dan kebaruan penelitian, serta tujuan penelitian. Latar belakang ditulis **tanpa** penomoran dan atau *pointers*.

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global yang mendesak, terutama dalam rangka menghadapi tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan inklusi sosial. Namun, realisasi tujuan tersebut tidak lepas dari peran kebijakan moneter sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan moneter, yang meliputi pengaturan suku bunga, pengendalian inflasi, dan pengelolaan likuiditas, memiliki dampak signifikan terhadap dinamika ekonomi suatu negara. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kebijakan moneter dapat berkontribusi melalui alokasi sumber daya yang efisien, mendorong investasi hijau, serta

mendukung stabilitas keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek-proyek berkelanjutan. Misalnya, kebijakan yang mendorong suku bunga rendah dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi proyek energi terbarukan, sementara pengendalian inflasi dapat memastikan daya beli masyarakat tetap stabil, yang penting untuk keberlanjutan sosial.

Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan moneter yang efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah ketegangan antara tujuan jangka pendek seperti stabilitas harga dan tujuan jangka panjang seperti pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Selain itu, ketidakseimbangan distribusi manfaat ekonomi dari kebijakan moneter sering kali memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat inklusi keuangan. Berdasarkan data Bank Dunia (2023), lebih dari 30% populasi global masih belum memiliki akses ke layanan keuangan formal, yang menjadi salah satu hambatan utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, peran kebijakan moneter dalam mendukung pembangunan berkelanjutan juga menghadapi tantangan unik. Sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan tingkat ketimpangan yang signifikan, Indonesia memerlukan kebijakan moneter yang tidak hanya fokus pada stabilitas makroekonomi tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan. Sebagai contoh, laporan Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa upaya mendorong investasi hijau melalui kebijakan kredit berkelanjutan masih terkendala oleh rendahnya literasi keuangan dan kurangnya insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi pada proyek-proyek ramah lingkungan.

Sejumlah penelitian sebelumnya di Indonesia telah membahas hubungan antara kebijakan moneter dan pembangunan berkelanjutan. Studi oleh (Dinata & Rangkuty, 2024) menunjukkan bahwa kebijakan moneter memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia, terutama melalui penerapan suku bunga rendah untuk mendukung akses pembiayaan.

Selain itu, (Wulandari, 2019) menekankan pentingnya literasi keuangan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan moneter untuk mendukung inklusi keuangan, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Penelitian ini menyoroti bagaimana inklusi

keuangan dan literasi keuangan saling memperkuat dalam mendorong keberlanjutan ekonomi.

Penelitian oleh (Wicaksono, Don Afrid Imanuel & Ir. Budi Santosa Kramadibrata, 2022) yang berjudul "Analisis Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Umkm Binaan Komunitas Jakpreneur Cipayung" juga memberikan kontribusi signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan suku bunga memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan UMKM untuk berkembang, sehingga kebijakan moneter harus dirancang untuk memitigasi dampak negatif tersebut.

Studi tambahan seperti "Analisis Pengaruh Penggunaan E-Money, BI-Rate, dan Jumlah Uang Beredar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" oleh (Putri et al., 2024) juga memberikan wawasan penting terkait bagaimana variabel moneter memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang mendukung penggunaan e-money dan pengelolaan BI-Rate secara tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Studi lain oleh (Yudi Setiawan & Karsinah, 2018), "Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Konvensional dan Syariah dalam Mempengaruhi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," studi ini memberikan pandangan tentang efektivitas kebijakan moneter konvensional dan syariah dalam mencapai stabilitas ekonomi.

Dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan moneter dapat dirancang dan diimplementasikan secara lebih efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam merumuskan strategi kebijakan moneter yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan secara global.

Penelitian ini akan membahas beberapa poin utama, yaitu:

1. Evaluasi kebijakan moneter di Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
2. Identifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan tersebut.

3. Rekomendasi untuk memperkuat peran kebijakan moneter dalam mendorong keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam mendukung formulasi kebijakan moneter yang efektif dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan elemen kunci dalam kebijakan ekonomi makro yang dapat disesuaikan dengan perubahan dalam siklus ekonomi. Menurut Mishkin (2008), hal ini mencakup upaya yang dilakukan oleh bank sentral untuk memengaruhi berbagai variabel moneter, seperti jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, akses kredit, dan nilai tukar mata uang. Fungsi utama dari kebijakan ini adalah untuk membantu mencapai tujuan ekonomi tertentu (Hakiki, 2024).

Bank Indonesia (2017) menjelaskan bahwa kebijakan moneter adalah metode pengendalian terhadap nilai moneter, yang meliputi uang yang beredar, uang primer, dan kredit bank, serta pengaturan tingkat suku bunga. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan yang berkelanjutan, pengurangan tingkat pengangguran, dan pengendalian inflasi agar tetap rendah atau stabil (Hidayati, 2019).

Menurut Nopirin (2009), kebijakan moneter terdiri dari serangkaian langkah yang diambil oleh otoritas moneter, seringkali oleh bank sentral, untuk mengatur pengeluaran uang dan kredibilitas di dalam perekonomian. Bank sentral memiliki tanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter yang bertujuan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, harga yang stabil, pemerataan pembangunan, dan neraca pembayaran yang seimbang (Andriani & Mohamad, 2022)

Kebijakan moneter mencakup berbagai strategi yang diterapkan oleh bank sentral untuk mengatur perkembangan variabel moneter di dalam ekonomi (Mishkin, 2008). Sebagai bagian dari strategi kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter bertujuan untuk membantu mencapai sasaran ekonomi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca yang sehat. Ini semua adalah tujuan akhir dari kebijakan moneter (Hakiki, 2024)

terdapat beberapa prasyarat penting yang harus dipenuhi. Pertama, meskipun tidak ada bank sentral yang sepenuhnya terbebas dari pengaruh pemerintah, beberapa instrumen kebijakan, seperti kebijakan fiskal, dapat tetap dijalankan secara mandiri. Kedua, pengendalian inflasi merupakan salah satu tujuan utama bank sentral, meskipun terkadang ada prioritas lain yang dapat berbenturan. Oleh karena itu, fokus utama kebijakan sebaiknya diarahkan pada pengendalian inflasi. Ketiga, kemampuan untuk memprediksi inflasi secara akurat menjadi hal yang sangat krusial. Keempat, bank sentral harus memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola dan mengawasi alat-alat kebijakan moneternya. Kelima, penerapan target inflasi yang jelas dan konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dirumuskan (Anas Lutfi, 2017)

Beberapa jenis kebijakan moneter yang umum digunakan oleh bank sentral untuk memengaruhi situasi moneter dan ekonomi antara lain: penetapan suku bunga, operasi pasar terbuka, regulasi persyaratan cadangan bank, kredit selektif, panduan ke depan, investasi mata uang, dan kebijakan makroprudensial. Kombinasi dari berbagai strategi kebijakan ini dapat digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menjaga stabilitas harga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memastikan sistem keuangan yang stabil (M. Natsir, 2014). Pemilihan dan penerapan jenis kebijakan moneter sangat bergantung pada keadaan ekonomi dan tantangan yang dihadapi negara pada saat itu.

2. Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai dikenal luas setelah disampaikan oleh Komisi Brundtland yang dipimpin oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland, yang beroperasi dari Oktober 1984 hingga Maret 1987, yang menghasilkan

publikasi berjudul “Our Common Future” oleh World Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987 (Suparmoko, 2020)

Pada abad ke-20, terjadi dua revolusi penting yang mengubah cara pandang terhadap peran lingkungan hidup dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Revolusi pertama berlangsung pada era 1960-an hingga 1970-an, ketika mulai muncul pemikiran bahwa terdapat pertentangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi sumber daya alam serta lingkungan. Upaya pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering kali diiringi oleh eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Dalam buku *Batas-Batas Pertumbuhan* (1972), Donella Meadows dan Nancy Meadows, yang merupakan bagian dari Kelompok Roma, memperingatkan bahwa tanpa pengurangan tingkat konsumsi, dunia akan menghadapi keruntuhan dalam waktu seratus tahun akibat habisnya sumber daya alam, pencemaran yang tinggi, dan kerusakan lingkungan yang parah.

Revolusi kedua terjadi pada tahun 1987 dengan diperkenalkannya konsep pembangunan berkelanjutan, yang didefinisikan sebagai pembangunan yang tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini diperkenalkan dalam sebuah konferensi internasional di Norwegia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Gro Harlem Brundtland. Revolusi ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak harus merusak lingkungan. Sebaliknya, terdapat sinergi antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan yang dapat mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan nasional dan memberikan kemampuan kepada negara untuk menjaga lingkungan. Di sisi lain, lingkungan yang sehat tidak hanya mengurangi biaya pembangunan tetapi juga mendukung kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya (Pratiwi, 2024)

Pembangunan berkelanjutan berlandaskan pada tiga pilar utama: keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang harus berkembang secara seimbang. Jika keseimbangan ini tidak tercapai, proyek pembangunan cenderung terjebak dalam pola konvensional yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, sementara aspek sosial dan lingkungan terabaikan. Model pembangunan konvensional sering kali menciptakan ketimpangan, di mana 20 persen penduduk di negara maju menguasai 80 persen dari

pendapatan global, sedangkan 80 persen penduduk di negara berkembang hanya memperoleh 20 persen sisanya. Ketimpangan ini menyebabkan berbagai hambatan, termasuk masalah sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan, serta penurunan sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti energi fosil dan batu bara. Selain itu, model ini juga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, yang ditandai oleh pencemaran udara, pencemaran air, kekurangan air di musim kemarau, dan banjir di musim hujan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga dirasakan di negara-negara maju (Sarwo, Agus Sudrajat, 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk menggali secara mendalam bagaimana kebijakan moneter di Indonesia mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan, identifikasi tantangan dan peluang, serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Instrumen utama yang digunakan adalah analisis dokumen, mencakup laporan kebijakan, data statistik dari Bank Indonesia, dan berbagai publikasi ilmiah terkait kebijakan moneter, yang akan dikumpulkan melalui studi literatur dari jurnal-jurnal terakreditasi Sinta dan dokumen resmi institusi terkait. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi mengidentifikasi dokumen dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian melalui pencarian di database jurnal terakreditasi, melakukan pengumpulan data statistik dari sumber resmi seperti laporan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan laporan internasional, serta menggunakan teknik analisis isi untuk mengkaji hubungan antara kebijakan moneter dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan data yang dikumpulkan. Untuk memastikan keandalan data, penelitian ini hanya menggunakan sumber-sumber terpercaya yang diakui secara ilmiah, seperti jurnal yang terakreditasi Sinta, laporan Bank Indonesia, dan publikasi dari institusi internasional, dengan validasi data dilakukan melalui perbandingan informasi dari beberapa sumber untuk memastikan konsistensi dan relevansi data terhadap tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Moneter Di Indonesia Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Berikut ini penjelasan untuk Sub judul kesatu. Kebijakan moneter di Indonesia memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan pengaturan likuiditas. Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas moneter, menggunakan berbagai instrumen seperti suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Tinjauan Kebijakan Moneter November 2024, BI mempertahankan BI-Rate sebesar 6,00% untuk memastikan inflasi terkendali dalam sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (B. Indonesia, 2024)

Penelitian oleh (Zaenab et al., 2024) menyoroti pentingnya kebijakan moneter dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, khususnya dalam konteks ekonomi syariah. Mereka menekankan bahwa kebijakan moneter yang responsif dan adaptif dapat meminimalkan risiko dalam sektor keuangan dan melindungi dana masyarakat.

Selain itu, penelitian oleh (Mochamad Salva Putra E & Agus Wahyudi, 2024) mengevaluasi peran kebijakan fiskal dan moneter dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi kebijakan moneter yang efektif. Menurut data Kementerian Keuangan, nilai tukar Rupiah pada akhir September 2024 menguat menjadi Rp15.140/USD, menguat 2,08% dibandingkan dengan posisi akhir Agustus 2024 (K. K. R. Indonesia, 2024). Fluktuasi nilai tukar ini dapat mempengaruhi sektor impor dan ekspor, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, BI juga mengembangkan instrumen pasar keuangan hijau. BI terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang keuangan berkelanjutan melalui capacity building yang relevan (B. Indonesia, 2021). Hal ini menunjukkan komitmen BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, kebijakan moneter di Indonesia telah beradaptasi dengan tantangan dan dinamika ekonomi global serta domestik. Namun, koordinasi yang erat dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural tetap diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara efektif.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan moneter di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, tantangan seperti fluktuasi nilai tukar masih memerlukan perhatian khusus. Koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal, serta inovasi dalam inklusi keuangan, menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Identifikasi Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Kebijakan Moneter

Implementasi kebijakan moneter di Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian ekonomi global yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi domestik. Fluktuasi nilai tukar dan perubahan harga komoditas global dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mengingat ketergantungan pada ekspor komoditas. (Indonesian Bank, 2015)

Selain itu, integrasi ekonomi regional, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), membawa tantangan tersendiri. Persaingan yang semakin ketat menuntut Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk domestik agar tidak hanya menjadi pasar bagi produk negara lain. Hal ini memerlukan kebijakan moneter yang adaptif dan sinergi dengan kebijakan fiskal serta reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi. (Indonesian Bank, 2015)

Di sisi lain, peluang muncul dengan adanya komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan, seperti Sustainable Development Goals (SDGs). Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi model pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia dan dunia dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam kebijakan ekonominya. Perubahan paradigma ekonomi yang tidak lagi menganggap kerusakan lingkungan sebagai biaya normal pembangunan menjadi kunci dalam hal ini. (Hidranto, 2024)

Namun, implementasi kebijakan moneter yang mendukung pembangunan berkelanjutan juga dihadapkan pada tantangan internal, seperti infrastruktur keuangan yang belum memadai dan institusi yang perlu diperkuat. Kolaborasi antara pemerintah, sektor keuangan, dan lembaga internasional menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif. (Annisa & Riofita, 2024)

Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau menghadirkan tantangan dalam mengubah paradigma pembangunan yang selama ini mengabaikan aspek lingkungan. Diperlukan reformasi fiskal dan kebijakan moneter yang mendukung investasi pada sektor-sektor ramah lingkungan serta mendorong inovasi dalam teknologi hijau. (Pradita, 2024)

Dalam konteks ini, Bank Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan tidak hanya fokus pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik dan koordinasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan moneter yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terdapat pula peluang signifikan untuk mencapai tujuan tersebut melalui reformasi kebijakan, peningkatan daya saing, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan Moneter Untuk Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Indonesia

Kebijakan moneter memiliki peran strategis dalam memastikan stabilitas ekonomi suatu negara sekaligus mendorong keberlanjutan sosial dan lingkungan. Di Indonesia, peran Bank Indonesia (BI) dalam merumuskan kebijakan moneter yang mendukung pembangunan berkelanjutan menjadi sangat krusial, mengingat tantangan global terhadap perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan yang holistik diperlukan, mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam desain kebijakan moneter. Salah satu rekomendasi penting adalah pemberian insentif kepada sektor-sektor yang berkontribusi terhadap

keberlanjutan, seperti energi terbarukan, teknologi hijau, dan usaha ramah lingkungan. Kebijakan seperti pemberian suku bunga rendah untuk investasi hijau atau insentif fiskal dapat meningkatkan daya tarik investasi pada sektor-sektor ini. Sebuah studi oleh Sriyono (2021) menekankan bahwa kebijakan semacam ini mampu mendorong percepatan transisi menuju ekonomi hijau. (Zaenab et al., 2024)

Selain itu, pengembangan instrumen keuangan hijau seperti obligasi hijau (green bonds) dapat menjadi alat untuk mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan. Di Indonesia, penerbitan green sukuk oleh pemerintah telah menjadi salah satu langkah positif dalam mobilisasi dana untuk proyek keberlanjutan. Instrumen ini tidak hanya menarik investor yang peduli lingkungan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam pembiayaan hijau di kawasan Asia Tenggara. Efektivitas kebijakan moneter dalam mendukung pembangunan berkelanjutan juga memerlukan sinergi dengan kebijakan fiskal dan peran aktif dari lembaga keuangan. Kolaborasi antara BI, Kementerian Keuangan, dan lembaga lain dapat menciptakan kebijakan yang saling mendukung. Misalnya, insentif moneter dari BI dapat diperkuat dengan kebijakan fiskal yang mendukung alokasi anggaran untuk proyek hijau.

Kebijakan yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi penting dalam mendorong keberlanjutan. Bank Indonesia perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan analisis teknis tetapi juga disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Peningkatan literasi keuangan menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan ekonomi. BI bersama otoritas lainnya dapat menyelenggarakan program edukasi yang menasar pelaku UMKM dan masyarakat luas, dengan fokus pada pengelolaan keuangan yang mendukung keberlanjutan.

Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung implementasi kebijakan moneter berkelanjutan. Digitalisasi dalam sistem pembayaran dapat mengurangi penggunaan sumber daya fisik seperti kertas, sementara data yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis kebijakan yang lebih tepat sasaran. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi kebijakan moneter untuk keberlanjutan tetap signifikan.

Beberapa tantangan meliputi kurangnya infrastruktur yang mendukung, resistensi dari pelaku industri tradisional, hingga minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan.

Sebagai langkah strategis, BI perlu memperkuat regulasi terkait pembiayaan hijau, meningkatkan koordinasi antar-lembaga, dan terus memantau dampak kebijakan moneter terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, kebijakan moneter di Indonesia tidak hanya menjadi alat untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga katalisator utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan moneter memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Indonesia, kebijakan moneter telah diarahkan untuk mendukung stabilitas makroekonomi melalui pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan pengaturan likuiditas. Namun, masih ada tantangan signifikan, seperti fluktuasi nilai tukar, ketergantungan pada ekspor komoditas, dan kurangnya infrastruktur keuangan yang memadai. Bank Indonesia telah berupaya mengembangkan instrumen keuangan hijau, seperti green sukuk, untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan dan mendorong transisi menuju ekonomi hijau. Koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal, inovasi teknologi, serta penguatan literasi keuangan menjadi elemen kunci dalam memastikan keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Tantangan lain meliputi resistensi dari industri tradisional, ketidakpastian ekonomi global, dan ketimpangan sosial yang masih signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang holistik, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta insentif yang mendorong investasi hijau untuk mencapai tujuan keberlanjutan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Anas Lutfi. (2017). *STRUKTUR DEFERENSI BANK INDONESIA. II*(1), 32–38.
- Andriani, F., & Mohamad, R. (2022). *URGENSI BANK SENTRAL INDONESIA DALAM*. 3(April), 1–15.
- Annisa, R. D., & Riofita, H. (2024). Tantangan Implementasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Negara-Negara Berpenghasilan Rendah: Tinjauan Literatur. *JALAKOTEK*:

Journal of Accounting Law Communication and Technology, 1(2), 475–480.
<https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2473>

- Dinata, M. G., & Rangkyu, D. M. (2024). *Efektivitas Kebijakan Moneter Terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia*. X(2), 88–98.
- Hakiki, A. (2024). *Analisis kebijakan moneter, fiskal dan inflasi pada pertumbuhan ekonomi*. 4(1), 41–63.
- Hidayati, N. (2019). *Analisis dampak bauran kebijakan moneter dan makroprudensial terhadap stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan di indonesia*. 2(3), 31–52.
- Hidranto, F. (2024). *Indonesia di Jalan Menuju SDGs 2030: Tantangan dan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan*. Portal Informasi Indonesia.
- Indonesia, B. (2021). *BI Kembangkan Instrumen Pasar Keuangan Hijau untuk Dorong Pembiayaan Ekonomi*.
- Indonesia, B. (2024). *Tinjauan Kebijakan Moneter*. In *Bank Indonesia*.
- Indonesia, K. K. R. (2024). *Siaran Pers Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga Di Tengah Berlanjutnya Dinamika Geopolitik Dan Ketidakpastian Ekonomi Global*.
- Indonesian Bank. (2015). *Tantangan, Arah Kebijakan dan Prospek Perekonomian Indonesia*. In *Jurnal Maritime Economy* (Vol. 52, Issue Prospek perekonomian Indonesia secara maritim).
- Mochamad Salva Putra E, & Agus Wahyudi. (2024). *Evaluasi Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 1(3), 183–191.
<https://doi.org/10.61132/jeap.v1i3.266>
- Pradita, A. W. (2024). *Menelisik Peluang dan Tantangan Ekonomi Hijau di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Pratiwi, M. Y. (2024). *PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI PADA MASA ORDE BARU (REZIM SOEHARTO) TERHADAP SEKTOR PEREKONOMIAN INDONESIA*. 04(01), 79–88.
- Putri, N. S., Nurjanah, R., & NUrhayani. (2024). *Pengaruh penggunaan e-money , BI-rate dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. *Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 12(1), 86–96.
- Sarwo, Agus Sudrajat, E. (2018). *PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : KAJIAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN KAMPUNG BATIK REJOMULYO SEMARANG TIMUR*. 12(1), 83–88.
- Suparmoko, M. (2020). *DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN REGIONAL* Muhammad Suparmoko. 9(1), 39–50.
- Wicaksono, Don Afrid Imanuel & Ir. Budi Santosa Kramadibrata, M. (2022). *ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA*

UMKM BINAAN KOMUNITAS JAKPRENEUR CIPAYUNG. 1(4), 487–500.

Wulandari, R. (2019). Keuangan Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Provinsi DKI Jakarta). In *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

Yudi Setiawan, R., & Karsinah. (2018). Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter dalam Mempengaruhi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 5(4), 460–473. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i4.22183>

Zaenab, Safitri, R. A., & Faqih, A. (2024). Analisis peran kebijakan moneter dalam upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam tinjauan ekonomi syariah. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(6), 1–11